Berkala Ilmiah Pendidikan
Volume 2 Nomor 1, Maret 2022

scidac plus

PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA (KASUS STAIN, IAIN, UIN DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM)

Afrizal Afrizal*
Sekolah Tinggi Agama Islam YKI Sumbar, Indonesia
afrizal@stai-yki.ac.id*

Abstrak

Perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia berawal sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pads bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Setelah terbentuknya STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Perkembangan berikutnya fakultas agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), kemudian fase berikutnya muncullah IAIN dan STAIN, selain itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Ekspansi perguruan Tinggi Agama Islam sebagai upaya pengembangan perguruan tinggi Islam dalam mewjudkan perguruan tinggi agama Islam lebih berkualitas dan bermutu serta mampu bersaing dengan PTU yang ada di Indonesia, Ekspansi perguruan tinggi agama Islam pada tejadi pada aspek kelembagaan, dimana awal sejarahnya, STI Menjadi UII, Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN, PTAIN dan ADIA Menjadi IAIN, kemudian IAIN Menjadi UIN. Konversi IAIN/STAIN menuju UIN merupakan respons positif dan konstruktif terhadap tantangan dunia pendidikan yang menglobal sehinga menghasilkan lulusan yang memiliki *competitive adventage*, daya saing yang andal dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Kata Kunci, Perguruan Tinggi Islam, Indonesia

Abstract

The development of Islamic universities in Indonesia began with the opening of the Islamic College (STI) in Jakarta in July 1945 before Indonesia's independence. After the formation of STI changed to UII (Islamic University of Indonesia). The next development of the religious faculty of UII was nationalized as PTAIN (State Islamic College), then the next phase came IAIN and STAIN, besides that, private Islamic higher education emerged, both in the form of universities, institutes, and high schools. Expansion of Islamic Higher Education as an effort to develop Islamic higher education in realizing higher quality and qualified Islamic higher education institutions and able to compete with PTUs in Indonesia. UII, UII Faculty of Religion became PTAIN, PTAIN and ADIA became IAIN, then IAIN became UIN. The conversion of IAIN/STAIN to UIN is a positive and constructive response to the challenges of a globalized world of education so as to produce graduates who have competitive adventage, reliable and strong competitiveness in facing the challenges of the times.

Keywords, *Islamic College, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sejarah Perkembangan pendidikan Islam lahir seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, meskipun pada mulanya hanya dalam bentuk yang sangat sederhana. Perkembangan pendidikan Islam secara historis tidak pernah sunyi dari persoalan dan rintangan yang dihadapinya. Pada masa sebelum kemerdekaan berhadapan dengan tekanan dan intimidasi pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Pada masa kemerdekaan berhadapan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tampak belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap lembaga pendidikan Islam. Meski demikian, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Pendidikan Islam dengan semua lembaga pendidikannya telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia (Rofi, 2016). Pemikir pendidikan Islam di Indonesia selalu mencari berbagai cara untuk membangun sistem pendidikan Islam yang lengkap, sistematis dan transparan, mulai pesantren yang sederhana sampai tingkat perguruan tinggi (Rukiati & Himawati, 2006).

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang menyebar hampir di seluruh nusantara bukan merupakan bentuk kelembagaan yang final dalam perkembangan kelembagaan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Seperti tercatat dalam sejarah, nama Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terus berubah sebagai upaya merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonlogi serta menjawab kebutuhan masyarakat dan sekaligus juga sebagai obyek tarik menarik antara berbagai kekuatan atau kelompok dalam masyarakat.

Perjalanan panjang perguruan tinggi Islam di Indonesia hingga sekarang, dapat dikategorikan tiga priodesasi. *Pertama,* priode awal sejak kedatangan Islam yang ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau atau masjid. Kedua, periode ketika pendidikan Islam telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada wal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah yang telah memasukkan pelajaran "umum" kedalam program kurikulumnya. Ketiga, periode lahirnya perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam system pendidikan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam semakin memperhatikan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Lahirnya perguruan tinggi Islam inilah yang kemudian melahirkan sejumlah terobosan yang luar biasa, karena lembaga pendidikan tinggi Islam ini melahirkan sejumlah ilmuan Islam modern di kemudian hari (Abrori & Nurkholis, 2019).

Sebenarnya ide pendirian perguruan tinggi Islam sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Namun diantara sekian banyak ide untuk untuk mendirikan perguruan tinggi Islam pada masa penjajahan bisa dikatakan belum berhasil (jika tidak mau mengatakan gagal) karena perguruan tinggi Islam yang didirikan tidak bertahan lama, kecuali sekolah tinggi yang dibentuk oleh masyumi. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Saat ini PTAIN terdiri atas 3 jenis yakni: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) (Syahri, 2022).

Sampai saat sekarang ini konsentrasi kelimuan di IAIN adalah pengembangan ilmu-ilmu agama. Menyikapi globalisasi dengan tuntutan yang semakin berkembang serta cita-cita untuk mengitegrasikan ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan ilmu yang tergolong *ecquired knowledge,* maka kemumuncul ide atau gagasan untuk mengembangkan lagi IAIN menjadi universitas merupakan sebuah keniscayaan untuk menjaga dan merawat ekssitentesinya dalam percaturan global maupun internasional. Ide ini akhirnya melahirkan Universitas Islam Negeri (UIN). Sejarah perkembangan dan pembaharuan perguruan Tinggi Islam menjadi sebuah kajian yang menarik untuk ditelusuri dan selanjutnya diuraikan dalam naskah ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan historis (untuk mengkaji perkembangan perguruan islam di Indonesia) (Danandjaja, 2014). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan berupa buku-buku yang ada di perpustakaan, artikel-artikel serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dikumpulkan dan diambil intisari yang berkaitan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dari dokumentasi terhadap data-data hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian. Taham pertama yang dilakukan adalah menganalisis dan identifikasi apa dan seperti apa masalah yang dikaji. Tahap kedua ialah pengkajian berbagai literatur dan data dokumentasi yang diperlukan untuk mencarikan solusi atas persoalan yang ditelaah. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan atas masalah yang dikaji (Danandjaja, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah berdiri dan berkembangnya Perguruan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Secara historis, upaya mendirikan perguruan tinggi Islam sebagai wahana pengembangan studi keislaman dalam konteks keindonesiaan yang pendiriannya dilatarbelakangi oleh banyak hal atas berbagai macam pertimbangan. *Pertama* adalah faktor intern yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada tahun 1927 (Mudyahardjo, 2016). *Kedua* adalah faktor ekstern yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia (Daulay, 2018). Kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia.

Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, umat Islam Indonesia mulai berkeinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Setidaknya ada beberapa fakta sejarah yang dapat dikemukakan antara lain:

1) Gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam dimunculkan Muhammadiyah, pada mu'tamar seperempat abad Muhammadiyah di Jakarta tahun 1936, juga diputuskan untuk mendirikan Sekolah Islam Tinggi dengan membuka Fakultas Dagang dan Industri, Namun Gagasan itu belum sempat terwujud karena pecahnya perang dunia II(Yunus, 1979).
2) Gagasan yang sama pernah dimunculkan Dr. Satiman Wirjosandjoyo Pada tahun 1938 dalam artikelnya di Pedoman Masyarakat pernah melontarkan gagasan yang baru yaitu pentingnya bagi umat islam untuk mendirikan perguruan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum Muslim ditengah-tengah masyarakat yang juga mengalami kemajuan akibat politik etis Belanda (Sunanto, 2007). Satiman juga mengatakan sewaktu Indonesia masih tidur, pendidikan pesantren memiliki peran penting bagi pendidikan agama islam. Namun setelah Indonesia bangun pada sekitar tahun 1904 Masehi diperlukan perguruan tinggi Islam guna mencetak generasi sarjan Islam yang unggul untuk mengelola madrasah. Apalagi dengan banyak datangnya kaum Kristen

yang mendirikan sekolah murah dan dikelola oleh para sarjana(Mudzhar, 2000). Selanjutnya gagasan itu ditindaklanjuti dalam forum Mu'tamar MIAI Pada tahun 1939, dari sinilah didirikan perguruan tinggi Islam di Solo yang dimulai dari tingkat menengah atas dengan nama IMS (*Islamische Midlebabre School).* Usaha untuk mendirikan sebuah universitas Islam yang menampung lulusan madrasyah dan pesantren, namun perguruan tinggi Islam ini hanya hidup sampai 1941 dan tutup karena pecahnya perang dunia II (Huda, 2015).

3) Mahmud Yunus bersama Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang sudah mendirikan Perguruan Tinggi Islam pertama di Indonesia pada tangal 9 Desember 1940 di Padang Sumatera Barat dengan *Islamic Colegge*. Lembaga ini dipimpin oleh Mahmud Yunus Sendiri, perguruan Tinggi ini terdiri dari dua fakultas yaitu Syariat/Agama dan pendidikan serta bahasa Arab, tujuan yang ingin dicapai lembaga ini adalah untuk mendidik ulama-ulama (Ramayulis, 2011). Perguruan Tinggi ini berjalan lancar hingga tahun 1942 M. Sayangnya karena pemerintah jepang masuk ke Padang (1942 M), pemerintah jepang hanya mengizinkan membuka sekolah/Madrasyah pada tingkat rendah sampai menengah saja, akhirnya Perguruan tinggi ini terpaksa ditutup pada tahun 1942 M (Yunus, 1979).

Akan tetapi, Umat Islam Indonesia tidak pernah berhenti menyuarakan pentingnya pendidikan tinggi Islam bagi kaum Muslim yang merupakan mayoritas pendudukan Indonesia. Pemerintah Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang itu direspon tokoh-tokoh muslim dengan membentuk yayasan, Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Natsir sebagai sekretaris. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1945 dengan bantuan pemerintah pendudukan Jepang, disaat peringatan Isra mi'raj Nabi Muhammad SWA didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta (Ramayulis, 2011). STI ini di pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Ketika masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di Yokyakarta. Dalam Upacara tersebut dihadiri oleh Presiden Soekarno dan wakil presiden Moh Hatta yang juga sebagai ketua Dewan Pengurus Sekolah Tinggi Islam (Huda, 2015).

Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat untuk mentrasnformasikan STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas;fakultas agama, hukum, ekonomi dan pendidikan. Perkembangan berikutnya adalah Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dinegerikan menjadi Peguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN)(Daulay, 2018). Untuk memulai secara resmi mengubah STI menjadi UII pada bulan Maret 1948 diadakanlah upacara pembukaan pendahuluan yakni pembukaan kelas pendahuluan di Yogyakarta. Setelah tingkat pendahuluan resmi dibuka maka berarti segala sesuatu yang diperlukan telah dipersiapkan untuk segera meresmikan perubahan STI menjadi UII. Acara penting yang disajikan pada upacara pembukaan UII adalah pembacaan Keputusan Dewan Pengurus tentang berdirinya UII, juga pidato oleh KHA. Kahar Muzakir, dan Dr. Mr. Kusumah Atmaja. Dengan demikian UII berpusat pada Yogyakarta sekarang adalah UII yang merupakan kelanjutan dan pengganti dari STI yang dibuka pertama kali di Jakarta tanggal 27 Rajab 1361 H atau 8 Juli 1945 (Klasik & Tengah, 2007).

Dengan perubahan STI menjadi UII ini, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama, akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama yang bersifat sekuler meskipun tetap berlandaskan agama dan semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini bukan tanpa alasan. Kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta non-Islam di yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 dan berkembang menjadi Universitas

Gajah mada (UGM) sejak tanggal 19 Desember 1949 memperoleh corak nasional. bukan tidak mungkin UGM ini menjadi saingan yang berat bagi UII.

Perubahan orientasi dalam UII ini berarti UII harus berkompetisi dengan universitas lain yang secara ideologis berbeda. UII bercorak keislaman, sedangkan UGM bercorak nasionalis. Pembukaan fakultas-fakultas sekuler merupakan suatu keharusan (kebutuhan) zaman spesialisasi ilmu menjadi tak terhindarkan. Ilmu-ilmu dalam Islam jelas tidak hanya menyangkut ilmu-ilmu agama tetapi termasuk ilmu-ilmu umum. UII jelas dengan penuh kesadaran melakukan perubahan-perubahan ini. Perubahan itu tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI, yaitu memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang mencakup ilmu-ilmu Islam. Sampai tahun 1950, UII merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia dan cikal bakal lahirnya perguruan tinggi Islam di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Dampak ikutan kehadiran UII ini secara kelembagaan mulai menggema pada tahun 1950-1960 yang ditandai dengan berdirinya PTIS (perguruan Tinggi Swasta) di berbagai kota.

Berkenaan dengan didirikan di Yogyakarta Universitas Gajah Mada yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh Assat selaku Pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu pula kepada umat Islam diberikan pemerintah pula Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1950. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.K/I/14641 tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/Kab.Tahun 1951 (Pendidikan tertanggal 1 September 1951). Tujuan PTAIN adalah untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Tujuan Praktis dari PTAIN adalah untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam (Daulay, 2018).

Penegerian fakultas agama UII menjadi PTAIN, dianggap sebagai bentuk penghargaan negara atas Islam. Tujuan dibentuknya PTAIN adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam yang sangat diperlukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya lembaga pendidikan tinggi bidang ilmu agama di Indonesia mengakibatkan para lulusan madrasah dan pesantren selama kurun waktu yang lama melanjutkan studinya ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama di Timur Tengah, Makkah maupun Kairo. PTAIN dalam sudut pandang ini diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu tersebut. Mempertinggi taraf pendidikan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan berarti mempertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritualitas) maupun intelektualisme. Ditinjau dari kerangka yang lebih luas dan dari sudut pandang kaum muslimin, pengambilalihan fakultas agama UII oleh pemerintah (Kementrian Agama) yang kemudian menjadi PTAIN dipandang sebagai langkah yang positif karena dengan cara ini pemerintah dapat berbuat lebih banyak bagi kemajuan umat Islam dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh universitas swasta(Huda, 2015).

Enam tahun kemudian, di Jakarta tepatnya tanggal 14 Agustus berdasarkan Permenag. No. 1 Tahun 1957 didirikan ADIA tanggal 1 Januari 1957 yang dipimpin oleh Mahmud Yunus. Lama belajar di ADIA adalah 5 tahun yang dibagi pada dua tingkatan. Tingkat semi akademik dengan masa belajar selama 3 tahun dan tingkat akademik dengan masa belajar selama 2 tahun. Masing-masing tingkat terdiri atas 2 jurusan yaitu Jurusan Agama dan Jurusan Sastera Arab. ADIA dimaksudkan untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi-

akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum, maupun kejuruan dan agama (Daulay, 2018).

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam, maka pada tanggal 24 Agustus 1960, presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta melebur menjadi satu yaitu menjadi IAIN "*Al-Jami'ah al-Islamiah al- Hukumiyah*" dengan pusat di Yogyakarta. IAIN ini diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab (Iswantir, 2017).

Berdirinya IAIN, dalam perkembangannya, ternyata mendapat respon positif dari masyarakat yang cukup luas, karenanya pemusatan IAIN hanya di dua kota, yokyakarta dan jakarta, membuat aspirasi masyarakat di seluruh negeri untuk belajar agama Islam tidak mampu tertampung, sebagian besar masyarakat muslim di beberapa daerah meminta lembaga pendidikan Islam didirikan di daerah mereka, minimal fakultas penting dibuka di wilayah mereka, menanggapi aspirasi raknyat yang berkembang. Pada tahun 1963, IAIN telah dikembangkan menjadi 18 fakultas yang tersebar di seluruh indonesia. Fakultas Adab dikembangkan di Yokyakarta dan jakarta, fakultas Syari'ah di Yokayakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang, dan Makasar, Fakultas Tarbiyah di dirikan di Yokyakarta, Jakarta, Malang, dan Banda Aceh, sementara itu, Fakultas Ushuluddin di Jakarta dan Yokyakarta(Huda, 2015). Banyak IAIN di daerah-daerah sedang jarak dan luasnya wilayah antar daerah menimbulkan kesulitan dalam pengaturannya. Akhirnya, pada tahun 1963, Departemen Agama menganggap perlu untuk memisahkan IAIN menjadi dua institut berbeda yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu IAIN Yogyakarta dengan Rektor Prof. R.H.Sunaryo dan IAIN Jakarta dengan Rektor Prof. H.Soenardjo. Pemisahan ini diatur melalui keputusan Menteri Agama No.49 tahun 1963 tertanggal 25 Pebruari.

Untuk mempermudah pengawasan dan pengorganisasiannya, dikeluarkan pembagian wilayah sebagai berikut: a) IAIN Yogyakarta mengkoordinir fakultas-fakultas yang berada di wilayah Jawa Tengah, kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irianjaya, b) IAIN Jakarta mengkoordinir fakultas-fakultas yang terdapat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera(Huda, 2015).

Menyusul Keputusan Menteri Agama diatas keluarlah peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tanggal 5 Desember 1963 yang memungkinkan didirikan sutau IAIN yang terpisah dari pusat, berdasrakan pertimbangan historis, Jakartalah yang pertama mendapat kesempatan untuk memiliki IAIN baru. Dengan demikian, IAIN Jakarta adalah IAIN kedua yang berdiri setelah IAIN Yokyakarta(Mudzhar, 2000). Kemudian hal yang sama berlaku bagi IAIN Jami'ah Ar-Raniri Banda Aceh pada 5 Oktober 1963, IAIN Raden Fatah di Palembang tanggal 22 oktober 1964, IAIN Antasari di Banjarmasin tanggal 22 November 1964, IAIN Alaudin Makasar tanggal 28 Oktober 1965, IAIN Sunan Ampel di Surabaya tanggal 6 Juli 1965, IAIN Imam Bonjol di Padang tanggal 21 November 1966, IAIN Sultan Thoha Saifuddin di Jambi 27 Juli 1967. Pada masa pemerintahan orde baru juga dikembangkan beberapa IAIN baru, yaitu IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung tanggal 28 Maret 1968, IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 28 Oktober 1968, IAIN Wali Songo di Semarang tanggal 1 April 1970, IAIN Syarif Qosim Riau 19 September 1970, dan IAIN Sumatera Utara di Medan tanggal 19 November 1973(Huda, 2015).

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI. No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997, tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yaitu dengan alasan peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN, dilakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk. Maka, sejak tanggal 1 Juli 1997 diresmikan berdirinya

STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) sejumlah 33 buah di seluruh Indonesia. STAIN yang berdiri tersebut antara lain: 1. STAIN Ponorogo 2. STAIN Jember 3. STAIN Kediri 4. STAIN Malang 5. STAIN Pamekasan 6. STAIN Mataram 7. STAIN Tulungagung 8. STAIN Salatiga 9. STAIN Gorontalo 10. STAIN Palopo 11. STAIN Serang Jawa Barat 12. STAIN Ternate 13. STAIN Bengkulu 14. STAIN Surakarta 15. STAIN Batu Sangkar Sumatera Barat 16. STAIN Kerinci 17. STAIN Bukittinggi 18. STAIN Pekalongan 19. STAIN Pontianak 20. STAIN Pare-Pare 21. STAIN Curup 22. STAIN Manado 23. STAIN Watampone 24. STAIN Kudus 25. STAIN Palangkaraya 26. STAIN Cirebon 27. STAIN Kendari 28. STAIN Samarinda 29. STAIN Pontianak 30. STAIN Jurai Siwo 31. STAIN Ambon 32. STAIN 33. STAIN Malang. STAIN ini adalah berasal dari fakultas-fakultas IAIN yang ada didaerah-daerah yang terpisah lokasinya dari IAIN induknya. STAIN ini berdiri untuk menyahuti peraturan juridist yang berkenaan dengan pendidikan tinggi serta untuk lebih menyahuti perkembangan zaman. Latar belakang berdirinya STAIN adalah untuk menanggapi peraturan yuridis yang bersangkutan dengan Pendidikan Tinggi dan juga sebagai respon atas perkembangan zaman agar Perguruan tinggi Islam tetap diminati di masyarakat(Harahap, 1998). Selain itu alasan cabang-cabang lembaga IAIN di luar kota IAIN induk dirubah menjadi STAIN yang berdiri sendiri dan mempunyai hak otonom penuh atau terlepas total dari urusan kelembagaan dengan IAIN induk adalah untuk memperpendek urusan birokrasi dan juga agar kinerja kelembagaan bisa berjalan lebih efektif(Hidayat & Prasetyo, 2000).

Perkembangan selanjutnya, Dalam dasawarsa terkahir (1993) dunia perguruan tinggi Islam di Indonesia khususnya IAIN dan STAIN, menggeliat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi secara lokal maupun global. Wujudnya adalah memperluas kewenangan yang telah dimilikinya selama ini, yang kemudian disebut dengan program " *Wider Mandate*" (Mandat yang diperluas) serta melakukan transformasi atau perubahan dari IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Perubahan IAIN menjadi UIN dan perubahan STAIN menjadi IAIN/UIN diharapkan mampu memberi peluang bagi rekonstruksi atau reintegrasi bangunan keilmuan, yang menjembatani ilmu-ilmu agama dan umum yang selama ini dipandang secara dikotomis. Dengan demikian lulusan UIN, IAIN dan STAIN mampu bersaing dengan perguruan tinggi umum lainnya. Selain itu para alumni adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan msyarakat.

Sejak diserahkannya SK Presiden tentang konversi IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN pada Tahun 2002 (Sari, 2016). Dua tahun kemudian disusul IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan STAIN malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim pada Tahun 2004 (Lazuardi, 2013).

Selanjutnya bertambah lagi yaitu IAIN Riau menjadi UIN Syarif Qasim Riau pada tahun 2005, IAIN Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2005 dan IAIN Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar tahun 2005, IAIN A-Rainiry Aceh menjadi UIN Ar-Rainiry Aceh tahun 2013, IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel tahun 2013. IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah tahun 2014, IAIN Sumatera Utara menjadi UIN sumatera Utara tahun 2014, IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo tahun 2014. Dari 55 jumlah PTAIN Yang ada di Indonesia yang dirintis sejak Tahun 1960 oleh masyarakat dan Pemerintah 11 diantaranya telah mengkonversi diri menjadi Universitas dengan kekhasan Islam yang melekat pada institusi. Hal ini bermakna bahwa PTAIN lainnya akan berupaya mengalihkan statusnya menjadi UIN seiring dengan bergulirnya sprit reformasi di dunia pendidikan, dan perubahan-perubahan global.

Berdasarkan penelusuran sejarah di atas, dapat dipahami bahwa Sejarah perkembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam adalah sejarah Ekspansi perguruan Tinggi Agama Islam, dalam artian upaya pengembangan perguruan tinggi Agama Islam dalam mewjudkan perguruan tinggi agama Islam lebih berkualitas dan bermutu serta mampu bersaing dengan PTU yang ada di Indonesia maupun dunia Islam lainnya pada masa mendatang. Ekspansi perguruan tinggi agama Islam pada tejadi pada aspek kelembagaan, dimana awal sejarahnya, STI Menjadi UII, Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN, PTAIN dan ADIA Menjadi IAIN, kemudian IAIN Menjadi UIN. UIN ini merupakan hasil transformasi IAIN yang secara kelembagaan berupa Institut menjadi Universitas. Sebagai sebuah lembaga Universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN, di dalamnya bukan hanya menekuni ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Prodi-Prodi ilmu agama berada di bawah naungan Departemen Agama, sementara Prodi-Prodi umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Perkembangan ini menarik untuk dicermati, karena memberi gambaran semakin jelas pentingnya "pendidikan satu atap". di Indonesia saat ini.

Ekspansi secara Subtantif pada pergurun tinggi agama, dimana pada awal mulainya mandat IAIN adalah mengembangkan Ilmu Agama Islam, sehingga terkesan dikotomi ilmu menuju ke arah Integrasi Ilmu atau Islam universal. Visi akademik perguruan tinggi Islam tersebut, secara berkelanjutan mengalami pembaharuan, pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an, pembaharuan perguruan tinggi Islam diperkenalkan istilah "IAIN *with wider-mandate*", atau "IAIN dengan mandat yang diperluas". Sejak itu, IAIN yang semula berkonsentrasi pada ilmu agama mulai merambah bidang-bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu umum.

Pembaharuan Perguruan Tinggi Islam sekarang ini, yang berupa UIN tersebut bukan merupakan perkembangan sesaat dan mendadak, tetapi merupakan pergulatan panjang umat Islam bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain, bahkan menjadi kecenderungan umum dunia kali ini. Seperti dimaklumi, abad ke-21 dikenal sebagai abad *PostModernime* yang dicirikan dengan perlunya penyatuan kembali antara ilmu dan agama. Dikhotomi ilmu dan agama atau dikhotomi ilmu umum dan ilmu agama dipandang tidak lagi relevan.

2. Urgensi dan Tantangan Konversi IAIN Menjadi UIN

Sebagai bagian yang integral dari sistem pendidikan nasional maka PTAIN, IAIN dan STAIN dalam proses alih statusnya sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan nasional dan internasional. Salah satu perubahan dimaksud adalah tentang perumusan paradigma baru Pendidikan Tinggi di Tanah Air. Pengkajian ulang terhadap kinerja PT dapat dilihat dari kerangka yang diajukan oleh D.A. Tisna Amijaya sebagaimana dikutip Azra yang mengidentifikasi lima masalah besar yang dihadapi PT pada umumnya. *Pertama,* produktivitas yang rendah; *kedua*, keterbatasan daya tampung; *ketiga*, keterbatasan kemampuan berkembang; *keempat*, kepincangan diantara berbagai PT; *kelima*, distribusi yang tidak seimbang dalam bidang-bidang ilmu yang disediakan khususnya di antara ilmu-ilmu social dan humaniora dengan ilmu-ilmu eksakta. Untuk mengatasi itu Amijaya sebagaimana dikutip Azra menawarkan lima program besar. *Pertama,* peningkatan produktivitas PT; *kedua,* peningkatan daya tampung; *ketiga,* peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan bidang keilmuan eksak atau iptek; *keempat,* peningkatan kemampuan berkembang(Hidayat & Prasetyo, 2000).

Gagasan paradigma baru PT muncul dengan dikeluarkannya " *World Declaration on Higher Education for the Twenty first Century : Vision and Action* oleh UNESCO yang memuat hal-hal mendasar aksi dan fungsi PT di abad 21. Pertama, bahwa misi dan nilai pokok PT adalah memberikan kontribusi

kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, memberikan berbagai kesempatan kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan tinggi sepanjang usia. Ketiga, memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu melalui riset, dan memberikan keahlian yang relevan untuk membantu masyarakat umum dalam pengembangan budaya, social, ekonomi; mengembangkan penelitian dalam bidang sains dan tekhnologi, ilmu-ilmu social, humaniora dan seni kreatif. Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan dan menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional, dan internasional dalam pluralism dan keragaman budaya. Kelima, membantu untuk melindungi nilai-nilai social dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang demokratis. Keenam, memberikan kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan pendidikan pada seluruh jenjang termasuk pelatihan guru. Bahkan yang tidak kalah pentingnya dari deklarasi tersebut adalah tentang peran etik, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi(United Nations Educational, 1998).

Dalam konteks Nasional konsep pengembangan PT dapat dilihat dari rumusan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang bertumpu pada tiga tungku utama yaitu, *pertama,* kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi yang luas. *Kedua,* akuntabilitas atau tanggungjawab tidak saja dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggungjawab tetapi juga dalam pengembangan ilmu, kandungan pendidikan dan program- program yang diselenggarakan. *Ketiga,* jaminan lebih besar terhadap kualitas melalui evaluasi internal yang dilakukan secara berkesinambungan; dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh BAN PT. Ketiga tungku paradigm baru tersebut saling terkait satu sama lain yang mesti diaktualisasikan secara simultan sebab, jika tidak maka perguruan tinggi akan tetap menghadapi berbagai persoalan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana konsep rumusan paradigm baru Pendidikan Tinggi.

Sabagai bagian yang tak terpisahkan dari sistim Pendidikan Nasional sekali lagi UIN tidak dapat mengisolasi dari perubahan-perubahan tersebut di atas. Paradigma baru PT di atas menjadi acuan bagi UIN yang mesti berani mengadakan perubahan-perubahan esensial secara priodik. Jika UIN lamban melakukan perubahan, lembaga ini akan ditinggalkan. Karenanya UIN harus berupaya melakukan pengkajian dan evaluasi karena secara eksternal dan internal UIN masih menghadapi berbagai masalah. Menurut Didin Syafaruddin secara internal masalah-masalah mendasar yang dihadapi tampaknya berkenaan dengan visi yang menjadi hambatan dalam pengembangan disebabkan oleh adanya kecenderungan kuat untuk melahirkan ahli yang memiliki keahlian dua bidang agama dan bidang umum.

Padahal waktu yang dirancang untuk itu sama dengan Pendidikan Tinggi pada umumnya(Nirwana, 2014). Justru itu menurut Azra bahwa gagasan dan konsep pengembangan IAIN menjadi UIN bertitik tolak dari masalah-masalah mendasar dan filosofis yaitu, *pertama*, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat. Ketiga lingkungan itu kelihatan peran IAIN lebih besar pada masyarakat karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. *Kedua,* kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan iptek dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena kajian agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang berinteraksi dengan ilmu-ilmu umum bahkan cenderung dikhotomis. Kurikulum IAIN masih terlalu berat kepada yang bersifat normatif. Sedangkan ilmu-ilmu umum yang akan mengarahkan mahasiswa kepada ilmu-ilmu empirik dan kontekstual masih sangat lemah(Iswantir, 2017).

Oleh karena itu secara epistemologis konversi IAIN menjadi UIN sesungguhnya merupakan proyek keilmuan yang berupaya mengintegrasikan dua bidang ilmu dalam satu atap sehingga tidak ada dikhotomi ilmu pengetahuan.Kondisi ini dibenarkan oleh Amin Abdullah, menurutnya ada tuntutan ganda terhadap PTAIN di Tanah Air. *Pertama,* berkaitan erat dengan eksistensinya sebagai lembaga keilmuan

yang dituntut untuk mengajarkan, meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam. *Kedua,* tuntutan yang terkait dengan kelembagaan IAIN sebagai lembaga keagamaan Islam yang barang tentu mempunyai dasar pemikiran yang berbeda dari tuntutan pertama. Yang pertama lebih berorientasi pada dunia pemikiran dan analisis- kritis yang menuntut seseorang menjadi "historian" (*muarrikh*). Sedangkan yang kedua lebih pada pemihakan dan pemegangan secara teguh pada pandangan hidup tertentu yang menuntut seseorang menjadi seorang *believer* (mukmin yang taat dalam menjalankan agama). Menurut Amin lebih lanjut bahwa hal ini sangat jauh berbeda dengan eksistensi PT sejenis semacam IKIP dan ISI, tampaknya IAIN mengalami sebuah delema. Dilema tersebut tidak dalam bentuk keabsahan eksternal kelembagaannya namun lebih merupakan dilema internal psikologis yang tercermin dalam bentuk ketegangan antara misi keilmuan dan misi keagamaan. Namun menurut beliau ketegangan ini tidak perlu dirisaukan karena di dalamnya terkandung dinamika dialektis yang memberikan manfaat bagi kedua sisi. Masing-masing mempunyai fungsi dan perannya sendiri tanpa harus mengetepikan yang satu dengan lainnya persis seperti koin yang mempunyai dua permukaan(Abdullah, 1995).

Selanjutnya menurut analisis Tafsir, ada beberapa hal yang menjadi sebab mengapa IAIN sebaiknya dikembangkan menjadi universitas Islam, antara lain:(Tafsir, 2010)

1) Kita memerlukan pemikir yang mampu berpikir yang komprehensif. Islam adalah agama yang lengkap yang mencakup seluruh sistem kehidupan. Islam tidak hanya berisi tuntunan tentang kepercayaan dan peribadatan atau ritual, melainkan juga tuntunan dalam hal mengatur urusan selain itu. Itu berarti setiap muslim harus mampu berpikir secara komprehensif. Banyak sekali masalah umat Islam yang tidak dapat di selesaikan dengan hanya menggunakan teori-teori pengetahuan agama seperti selama ini. Masalah-masalah ini baru dapat diselesaikan secara sempurna bila menggunakan juga teori-teori pengetahuan umum.
2) Ilmu Agama memerlukan Ilmu Umum. Pada IAIN dibuka banyak fakultas dan jurusan, semua jurusan itu adalah jurusan yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Pendalaman ilmu agama pada jurusan itu memerlukan bantuan ilmu umum. Jadi, untuk meningkatkan mutu ilmu agama diperlukan bantuan ilmu umum. Kebutuhan itu secara perlahan akan terpenuhi bila IAIN dikembangkan menjadi UIN.
3) Meningkatkan harga diri Sarjana dan mahasiswa Muslim. Masuknya ilmu umum ke IAIN bila telah menjadi universitas akan dapat meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim. Selama ini sarjana dan mahasiswa muslim kurang dikenal dikalangan sarjana dan mahasiswa lainnya. Sebabnya antara lain karena sarjana dan mahasiswa muslim hanya berkiprah dalam ilmu keagamaan, khususnya Islam. Bila IAIN dikembangkan menjadi universitas maka lapangan kiprah sarjana dan mahasiswa muslim akan lebih luas.
4) Menghilangkan paham dikotomik antara ilmu Agama dan Umum. Dikotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Paham ini harus dihilangkan. Penyatuan kembali pengetahuan agama dan pengetahuan umum dapat dilakukan secara sistemik di Universitas Islam.
5) Memenuhi harapan masyarakat muslim. Banyak sekali orangtua mahasiswa yang berharap anaknya menjadi sarjana dalam ilmu umum yang memiliki ilmu yang teguh dan mengetahui juga dasar-dasar agama Islam.
6) Memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Pada era globalisasi ini akan timbul persaingan bursa kerja dan yang dibutuhkan adalah mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di berbagai bidang. Agar perguruan tinggi Islam dapat menyediakan tenaga-tenaga seperti itu, maka harus dapat menghasilkan lulusan di berbagai bidang, dan
7) Memenuhi harapan umat Islam dengan memberi mereka kedudukan yang lebih penting dalam

lapangan pendidikan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, analisis yang dilakukan Nata mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN:(Nata, 2012)

1) Perubahan pada jenis pendidikan Madrasah Aliyah. Dulunya Madrasah adalah sekolah agama, kini madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah umum atau sekolah yang berciri khas Islam. Di madrasah sudah terdapat mata pelajaran umum yang dimuat dalam kurikulumnya. Misalnya eksakta, sosial, bahasa dan fisika. Di samping itu konversi ini juga untuk menyambut tamatan sekolah menengah umum dapat masuk IAIN apabila telah menjadi UIN, karena dapat menyediakan jurusan dan fakultas umum.
2) Adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Masalah dikotomi ini solusinya adalah program integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum.
3) Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Selama ini, arah lulusan IAIN adalah lembaga pendidikan Islam, kegiatan kegiatan keagamaan, dakwah dan pada tataran departemen agama. Maka dengan perubahan menjadi UIN akan lebih meluas lingkup kerja dan eksistensi lulusan IAIN. Dengan perubahan menjadi UIN juga sebagai upaya konvergensi ilmu umum dan agama, seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution bahwa perubahan IAIN menjadi universitas dirancang untuk menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan.
4) Perubahan IAIN menjadi UIN adalah dalam rangka memberikan peluang bagi lulusan IAIN untk melakukan mobilitas vertikal. Yakni kesempatan gerak dan peran serta memasuki medan yang lebih luas. Lulusan IAIN akan memasuki wilayah dan lingkungan yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi. Perubahan ini juga ingin kembali menaruh harapan umat Islam menjadi pelopor peradaban manusia yang dulu pernah dicapai Islam zaman klasik.
5) Perubahan IAIN menjadi UIN juga merupakan tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan yang profesional, berkualitas tinggi dan menawarkan banyak pilihan. Apalagi dengan arus globalisasi yang melahirkan lingkungan persaingan dan kompetisi. Sehingga IAIN menjadi UIN merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan dan menangkap peluang.

Memperhatikan berbagai latar belakang di atas, menunjukan bahwa konversi/transformasi IAIN kepada UIN meruapakan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Perguruan tinggi Islam yang berkualitas serta memiliki daya saing dengan perguruan tinggi umum baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus didukung dengan pembaharun pada bidang kelembagaan, sarana, fasilitas dan ketersediaan sumber daya dosen yang secara epistemologi Islam dapat memenuhi jurusan-jurusan dan fakultas umum baru. Disamping itu, harus ada upaya mengubah batasan-batasan yang terdapat dalam UU Sisdiknas yaitu Diknas mengelola ilmu-ilmu umum sedangkan Kemeterian Agama mengelola ilmu-ilmu agama.

Perubahan status IAIN/ STAIN menjadi UIN, menurut Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawwar pada waktu itu, membawa berbagai implikasi dan tantangan cukup besar. Karena itu, Menteri Agama menyerukan agar segera berusaha mengkaji dan mencari solusinya. Dibutuhkan perjuangan dari Mendiknas dan kerja keras para pejabat eselon I di lingkungan Depdiknas dan Depag dalam rangka mewujudkan sebuah lembaga akademik yang bercitra dan memilikikepercayaan kuat dari masyarakat(Tunru, 2018). Selain itu, perubahan ini dimaksudkan agar UIN bisa mengembangkan disiplin ilmu-ilmu lain yang bersifat universal tanpa terkungkung pada ilmu-ilmu keagamaan semata. Perubahan tersebut tentunya didukung dengan berubahan lebih awal dari sisi SDM, administrasi dan pendanaan dan pengembangan kelembagaan(Idris, 2008). Diharapkan UIN bisa memberikan wacana keagamaan yang betul-betul membumi

pada setiap bidang keilmuan. Orientasi seperti inilah yang mesti dilakukan oleh UIN di masa depan untuk membangun ilmu pegetahuan yang berkeadaban (*civilized*) dengan memasukkan ilmu-ilmu keagamaan pada setiap bidang keilmuan. Wacana ini, meminjam istilah Ismail Raji Al-Faruqi disebut "Islamisasi ilmu pengetahua. "Relevansi semua ini terlihat ketika melihat wacana keagamaan tidak menyentuh sisi empirik persoalan di masyarakat.

Respons masyarakat terhadap perubahan status STAIN/IAIN menjadi UIN cukup beragam. Sebagian mereka menilai positif karena mahasiswa UIN, nantinya, tidak hanya terdiri dari kalangan muslim santri (pesantren), tetapi juga kalangan muslim non-santri baik yang belajar di SMU, SMK, maupun lainnya. Pada sisi lain penilaian negatif juga muncul seiring dengan pembukaan jurusan umum tersebut. Penilaian tersebut terangkum dalam beberapa poin: pertama, semakin terkikisnya studi-studikeislaman(Tunru, 2018).

Hal ini terlihat dari keluhan dosen UIN Syarif Hidatullah Jakarta karena semakin kecilnya mahasiswa yang menekuni Islamic studies seperti filsafat Islam, pendidikan Islam, sejarah dan peradaban Islam, dan lainnya. Islamic studies merupakan ciri khas IAIN selama bertahun-tahun. la merupakan cikal bakal IAIN untuk mencetak kader-kader *excellent* seperti Mukti Ali, Harun Nasution, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, dan lainnya. Menurutnya, minat mahasiswa terhadap *Islamic studies* karena studi studi tersebut dianggap tidak menjanjikan masa depan. Sejalan denganperkembangan zaman, peserta didik memilih jurusan-jurusan umum seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu pariwisata, dan lainnya.

Kedua, budaya mahasiswa UIN menjadi sangat beragam. Budaya tersebut tentu saja bersinggungan antara satu dengan lainnya karena akar tradisinya berbeda-beda seperti santri versus non-santri, anak desa versus anak kota. Bahkan, seluruh budaya ini kemudian didialektikakan dengan budaya modern yang *notabene* dibawa oleh negara-negara Barat (Tunru, 2018). Dalam konteks inilah meminjam istilah para kiai pesantren UIN tak ubahnya rumah sakit yang harus memberikan obat terhadap berbagai penyakit umat. UIN harus menyediakan banyak dana untuk biaya pengobatan berbagai penyakit yang diderita pasien tersebut. Karena itu, UIN harus bisa mengantisipasi munculnya perilaku-perilaku mahasiswa yang tidak mencerminkan almaternya. Bila STAIN/IAIN menuju UIN dalam merespon tantangan globalisasi, tampaknya memang sangat relevant mengingat era ini nampak dirasakan saat ini sangat kompetitif, global, dan seringkali penuh nuansa krisis dan keguncangan. Sehingga semua lembaga perlu mengaca diri, sejauhmana ia memiliki kesiapan (konsep, SDM, dan mental) dalam memasuki wilayah globalisasi, otonomisasi dan modernisasi.

Untuk merespon kekhawatiran yang muncul Amin Abdullah memberikan empat jawaban yang secara ontologis dapat menjelaskan hakikat dan karakteristik UIN ke depan. *Pertama* berlandaskan kepada surat Mendiknas kepada Menteri Agama, tanggal 23 Januari 2004 yang menyatakan sebagai berikut: " Meskipun IAIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai institusi Pendidikan Tinggi bidang agama, sedangkan peyelenggaraan program non agama Islam (umum) merupakan tugas tambahan (Tono, 2020).

Berlandaskan pada penegasan surat tersebut bahwa tugas utama UIN adalah tetap sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang agama (*main mandate*), sedangkan penyelenggaraan ilmu-ilmu umum merupakan tugas tambahan (*wider mandate*). *Wider mandate* ini tidak boleh menggeser tugas utamanya. *Kedua*, lima fakultas yang sejak awal berdiri akan tetap dipelihara, bahkan dalam kerangka konversi akan diperkuat dengan standar metodologi baru selevel dengan universitas lain dengan berbagai penyesuaian sehingga memiliki daya saing dan daya tawar. *Ketiga*, rancangan fakultas di bawah UIN akan disesuaikan

dengan prinsip dasar "Miskin struktur, kaya fungsi". Karenanya untuk memperkuat fakultas agama dilakukan cara memadukan fakultas agama dengan program studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada fakultas-fakultas yang ada sekarang. Sehingga fakultas-fakultas yang ada sekarang berubah nama menjadi: Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Sains dan Tekhnologi serta Sosial dan Humaniora. *Keempat,* Konversi IAIN ke UIN akan memberikan ruang gerak yang lebih luas dibanding dengan Institut, karena universitas membidangi berbagai cabang disiplin keilmuan, baik eksakta, social maupun humaniora(Abdullah, 2006). UIN Sebagai institusi akademis dan religious dengan mandate lebih luas tentu memerlukan model tertentu dilihat dari sisi epistemologi maupun secara kelembagaan. Hal ini semakin diperlukan untuk menjaga bidang-bidang agama yang selama ini menjadi karakter IAIN tidak termarjinalisasi seperti terlihat dalam beberapa kasus karena ekspansi ilmu-ilmu umum. Dengan mandat seperti di atas setidaknya terdapat tiga model yang akan ditempuh.

1) Model "Universitas al-Azhar" di mana fakultas-fakultas agama berdiri berdampingan dengan fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas ini cenderung terpisah satu sama lain meskipun tetap satu payung. Kecenderungan model ini bahwa fakultas-fakultas umum lebih favorit, sementara fakultas-fakultas agama menjadi pilihan kedua atau terpinggirkan atau *peripheral*.
2) Model Perguruan Tinggi Islam swasta yang ada di Indonesia seperti, UISU, UNISBA, UII Yogyakarta, dan seperti Universitas Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia. Model Universitas-universitas ini fakultas umum berdampingan dengan fakultas agama secara terpisah. Fakultas agama terdiri dari jurusan-jurusan, sedangkan dalam institusi IAIN jurusan itu berbentuk Fakultas. Dalam model ini fakultas agama menjadi peripheral karena hanya ada satu fakultas agama.

Model Universitas Islam Antarbangsa (UIA) Kuala Lumpur. Dalam model ini ilmu-ilmu dibagi menjadi *revealed knowledge* Ilmu-ilmu kewahyuan yang melahirkan fakultas dan jurusan agama dan *acquired knowledge* ilmu perolehan yang selanjutnya diterjemahkan menjadi fakultas- fakultas atau jurusan-jurusan umum, seperti teknik, kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini selain di islamisasikan juga dilengkapi dengan subyek-subyek keislaman yang berkaitan(Lazuardi, 2013).

Dengan demikian perubahan IAIN menuju UIN merupakan peluang besar bagi PTAIN yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga akademis relijius yang tak terpisahkan dari sistim Pendidikan Nasional kerangka perubahan UIN akan tetap mempertahankan tugas utamanya yaitu sebagai lembaga Pendidikan Agama dengan tugas tambahan menyelenggarakan program ilmu-ilmu umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikuit:

1. Sejarah perkembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam adalah sejarah Ekspansi perguruan Tinggi Agama Islam, dalam artian upaya pengembangan perguruan tinggi Agama Islam dalam mewjudkan perguruan tinggi agama Islam lebih berkualitas dan bermutu serta mampu bersaing dengan PTU yang ada di Indonesia maupun dunia Islam lainnya pada masa mendatang. Ekspansi perguruan tinggi agama Islam pada tejadi pada aspek kelembagaan, dimana awal sejarahnya, STI Menjadi UII, Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN, PTAIN dan ADIA Menjadi IAIN, kemudian IAIN Menjadi UIN. UIN ini merupakan hasil transformasi IAIN yang secara kelembagaan berupa Institut menjadi Universitas.
2. Ekspansi secara Subtantif pada pergurun tinggi agama, dimana pada awal mulainya mandat IAIN adalah mengembangkan Ilmu Agama Islam, sehingga terkesan dikotomi ilmu menuju ke arah Integrasi Ilmu atau Islam universal. Visi akademik perguruan tinggi Islam tersebut, secara berkelanjutan mengalami pembaharuan, pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an, pembaharuan perguruan

tinggi Islam diperkenalkan istilah "IAIN *with wider-mandate*", atau "IAIN dengan mandat yang diperluas". Sejak itu, IAIN yang semula berkonsentrasi pada ilmu agama mulai merambah bidang-bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu umum.

3 Konversi IAIN/STAIN menuju UIN merupakan respons positif dan konstruktif terhadap tantangan dunia pendidikan yang menglobal. Dengan demikian dapat memproduk alumni-alumni yang memiliki *competitive adventage*, daya saing yang andal dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

4 Sebagai sebuah lembaga Universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN, di dalamnya bukan hanya menekuni ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Prodi-Prodi ilmu agama berada di bawah naungan Departemen Agama, sementara Prodi-Prodi umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Perkembangan ini menarik untuk dicermati, karena memberi gambaran semakin jelas pentingnya "pendidikan satu atap". di Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (1995). *Falsafah kalam di era postmodernisme*. Google Scholar

Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Perguruan Integratif-Interkonektif*. Google Scholar

Abrori, M. S., & Nurkholis, M. (2019). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan PAI Di Perguruan Tinggi Umum. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(1), 09–18. https://doi.org/10.30599/jpia.v6i1.419

Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*. Google Scholar

Daulay, H. H. P. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana. Google Scholar

Harahap, S. (1998). IAIN di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan dari Sudut Pemikiran Islam" dalam Sayahrin Harahap. *Perguruan Tinggi Islam Di Era Globalisasi, Yogyakarta*. Google Scholar

Hidayat, K., & Prasetyo, H. (2000). *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal. Google Scholar

Huda, N. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Google Scholar

Idris, M. (2008). Pemberdayaan Kualitas Umat Menuju Masyarakat Madani (Sebuah opsi memasuki masyarakat yang membebaskan). *Makassar: PPs UIN Makassar*. Google Scholar

Iswantir, M. (2017). Azyumardi Azra Thinking About Paradigm Scientific And Institutionaland Implications For The Evelopment Of Islamic State University (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta. *Proceedings PANTUM KUIS Selangor*, *1*(1), 58–71. http://repo.iainbukittinggi.ac.id/117/

Klasik, D. M., & Tengah, H. M. (2007). *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*. Google Scholar

Lazuardi, L. (2013). UIN: Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, *1*(02). Google Scholar

Mudyahardjo, R. (2016). *Pengantar pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia*. Google Scholar

Mudzhar, M. A. (2000). Kedudukan UIN sebagai Perguruan Tinggi. *Dalam Problem Dan Prospek IAIN: Anotologi Pendidikan Tinggi Islam, Ed. Komaruddin Hidayat&Hendro Prastyo. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI*. Google Scholar

Nata, H. A. (2012). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana. Google Scholar

Nirwana, D. (2014). *Menjadi Pelajar Muslim Modern Yang Etis dan Kritis Gaya Ta'lim Al-Muta'allim*. IAIN

ANTASARI PRESS. Google Scholar

Ramayulis, H. (2011). *Sejarah pendidikan Islam: napaktilas perubahan konsep, filsafat, dan metodologi pendidikan Islam dari era nabi SAW sampai ulama Nusantara*. Kalam Mulia. Google Scholar

Rofi, S. (2016). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Deepublish. Google Scholar

Rukiati, E. K., & Himawati, F. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia. Google Scholar

Sari, R. M. (2016). Perguruan Tinggi Islam dan Transformasi Lembaga: Studi Terhadap Proses Perubahan Fungsi dan Peran IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam. *El-Hekam*, *1*(1), 1–18. http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v1i1.334

Sunanto, M. (2007). *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Google Scholar

Syahri, S. (2022). Pembaharuan Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman Dalam Perguruan Tinggi Agama Islam. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.51214/bip.v2i1.336

Tafsir, A. (2010). Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*. Google Scholar

Tono, S. (2020). *Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 422 Tahun 2004 Nomor: 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf)*. Google Scholar

Tunru, M. I. (2018). STAIN/IAIN Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, *3*(1). http://dx.doi.org/10.30984/jii.v3i1.547

United Nations Educational, S. and C. O. (1998). *Higher Education in the twenty-first century: Vision and action*. Google Scholar

Yunus, M. (1979). *Sejarah pendidikan Islam; dari zaman Nabi SAW, khalifah-khalifah Rasyidin, Bani Umaiyah dan Abbasiyah sampai zaman Mamluks dan Usmaniyah Turki; untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN*. Hidakarya Agung. Google Scholar